

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PERDAGANGAN MINUMAN KERAS
BERALKOHOL JENIS ARAK CIU TANPA
IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
126/PID.Sus/2019/PN.Bks)**

**SRIWATI
22102058006**



**UNIVERSITAS NASIONAL
MAGISTER HUKUM
JAKARTA
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PERDAGANGAN MINUMAN KERAS
BERALKOHOL JENIS ARAK CIU TANPA
IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
126/PID.Sus/2019/PN.Bks)**

**SRIWATI
22102058006**

Tesis Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum



**UNIVERSITAS NASIONAL
MAGISTER HUKUM
JAKARTA
2024**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik Magister, baik di Universitas Nasional maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, dengan arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis yang jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, 24 Februari 2024
Yang Membuat Pernyataan



Sriwati

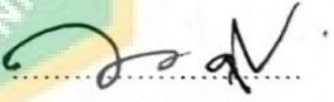
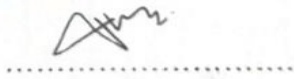


NPM. 22102058006

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN TESIS

Nama Mahasiswa : Sriwati
NPM : 22102058006
Program : Magister Hukum
Program : Hukum Pidana
Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PERDAGANGAN MINUMAN KERAS BERALKOHOL
JENIS ARAK CIU TANPA IZIN (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 126/PID.Sus/2019/PN.Bks)

Tesis ini telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 24 Februari 2024 sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Tesis.

Jakarta, 24 Februari 2024

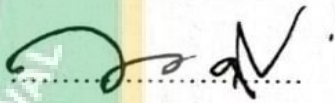
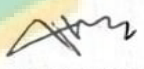
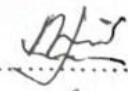
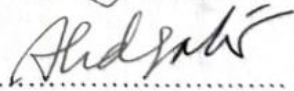
	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA SIDANG	Dr. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.	
SEKERTARIS SIDANG	Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., M.A.	
PEMBIMBING	Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H.	
PENGUJI	Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D	

LEMBAR PENGESAHAN PENILAIAN TESIS

Nama Mahasiswa : Sriwati
 NPM : 22102058006
 Program : Magister Hukum
 Program : Hukum Pidana
 Judul Tesis : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP
 PERDAGANGAN MINUMAN KERAS BERALKOHOL
 JENIS ARAK CIU TANPA IZIN (STUDI KASUS
 PUTUSAN NOMOR 126/PID.Sus/2019/PN.Bks)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 24 Februari 2024 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Jakarta, 24 Februari 2024

	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA SIDANG	Dr. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.,	
SEKERTARIS SIDANG	Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., M.A.,	
PEMBIMBING	Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H.,	
PENGUJI	Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D	

ABSTRAK
Universitas Nasional
Sekolah Pascasarjana Program Magister Hukum
Tesis, 24 Februari 2024

- A. Nama Penulis : Sriwati
- B. NPM : 22102058006
- C. Judul Tesis : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN MINUMAN KERAS BERALKOHOL JENIS ARAK CIU TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 126/PID.Sus/2019/PN.Bks)**
- D. Jumlah Halaman : Halaman Pengantar (11), Halaman Isi 88
Tahun Pembuatan 2024

E. Isi Abstrak

Minuman beralkohol diizinkan beredar di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, namun masih banyak ditemukan beberapa pelaku usaha yang tidak mengantongi izin namun masih beroperasi dalam praktik menjual minuman beralkohol. Akibat dari adanya pelaku usaha yang menjual minuman keras secara sembarangan tanpa mengantongi izin jual adalah beredarnya minuman oplosan yang membahayakan nyawa. Berdasarkan uraian tersebut, penulis membuat rumusan masalah untuk dikaji yaitu: 1). Bagaimana ketentuan tindak pidana perdagangan minuman keras beralkohol arak ciu? 2). Bagaimana penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras beralkohol arak ciu tanpa izin? 3). Bagaimana kendala dalam mengatasi tindak pidana perdagangan minuman keras beralkohol jenis arak ciu?. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, dapat disimpulkan bahwa ketentuan tindak pidana perdagangan minuman keras beralkohol arak ciu terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan dan Pengawasan Terhadap Penggandaan, Peredaran, Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Bekasi. Dalam penegakan hukum yang dilakukan dalam 2 (dua) cara, yaitu preventif dan represif. Adapun tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan terpaksa. Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah yang ada khususnya mengenai

minuman keras. Dalam mengatasi tindak pidana perdagangan minuman keras beralkohol jenis arak ciu terdapat beberapa kendala di lapangan yaitu: 1). Adanya Kebocoran Informasi Saat Melakukan Razia. 2). Pemilik Usaha Yang Tidak Kooperatif. 3). Pelaku usaha mengacuhkan Peraturan Daerah. 4). Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam menegakkan Peraturan Daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, perlu dilakukan upaya edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang dampak negatif minuman keras terhadap kesehatan dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatkan kesadaran akan risiko dan konsekuensi dari konsumsi minuman keras, diharapkan akan terjadi penurunan permintaan dan penjualan secara alami. Dan penting untuk dilakukan peningkatan dalam hal keamanan informasi terkait rencana dan pelaksanaan razia melalui pelatihan yang lebih intensif bagi petugas yang terlibat dalam razia, serta penerapan protokol keamanan yang ketat untuk mencegah kebocoran informasi.

Kata Kunci: **Penegakan Hukum, Perizinan, Perdagangan Minuman Keras Beralkohol**

- F. Daftar Pustaka : 1983 - 2021
G. Dosen Pembimbing : Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H.



ABSTRACT

National University
Post graduate School of Master of Law
THESIS, 24 Februari 2024

- A. Name : Sriwati
- B. Student Number : 22102058006
- C. Title of Thesis : **LEGAL ENFORCEMENT OF THE TRADE IN ALCOHOLIC DRINKS TYPES OF ARAK CIU WITHOUT LICENSE (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 126/PID.Sus/2019/PN.Bks)**
- D. Number of Pages : **Preface (11), Content of Pages for Thesis 88, Year of Production 2024**

E. Abstract Contents

Alcoholic beverages are allowed to circulate in Indonesia with applicable provisions, but there are still many business actors who do not have a license but are still operating in the practice of selling alcoholic beverages. The result of businesses selling liquor carelessly without a license is the circulation of oplosan drinks that endanger lives. Based on this description, the author makes a formulation of the problem to be studied, namely: 1). How are the provisions of the criminal act of trading alcoholic liquor arak ciu? 2). How is law enforcement against unlicensed trade of alcoholic liquor arak ciu? 3). How are the obstacles in overcoming the crime of trading alcoholic liquor of arak ciu? By using normative legal research, it can be concluded that the provisions of the criminal act of trading alcoholic liquor arak ciu are found in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 74 of 2013 concerning Control and Supervision of Alcoholic Beverages, Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 47 of 2018 concerning the Fourth Amendment to the Regulation of the Minister of Trade and Supervision of the Multiplication, Distribution, Law No. 18 of 2012 concerning Food, and Sale of Alcoholic Beverages, Bekasi City Regional Regulation No. 17 of 2009 concerning Supervision and Control of Liquor Distribution in Bekasi City. In law enforcement carried out in 2 (two) ways, namely preventive and repressive. Preventive action is carried out if possible and there is still public awareness to comply with the law. Meanwhile, repressive action is an action taken if preventive action is ineffective, so that the community implements the law even though it is forced. The implementation of law enforcement is carried out to enforce existing Regional Regulations, especially regarding liquor. In overcoming the criminal act of trading alcoholic liquor types of arak ciu there are several obstacles in the field, namely: 1). The existence of information

leakage when conducting raids. 2). Uncooperative business owners. 3). Business actors ignore regional regulations. 4). Lack of community participation in enforcing local regulations. Based on the research conducted, more intensive education efforts need to be made to the public about the negative impact of liquor on health and society as a whole. By raising awareness of the risks and consequences of liquor consumption, a natural decrease in demand and sales is expected. And it is important to improve information security regarding the planning and execution of raids through more intensive training for officers involved in raids, as well as the implementation of strict security protocols to prevent information leakage.

Keywords: **Law Enforcement, Licensing, Alcoholic Liquor Trade**

- F. References : 1983 - 2021
G. Tutor : Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta karunia-Nya, saya berhasil menyelesaikan tesis dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras Beralkohol Jenis Arak Ciu Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 126/PID.Sus/2019/PN.Bks)”

Diharapkan Tesis ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan kepada kita semua tentang Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras Beralkohol Jenis Arak Ciu Tanpa Izin di Indonesia.

Saya menyadari betapa Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca tentu lah saya harapkan demi sempurnanya Tesis ini. Dalam proses menyusun Tesis ini tentunya Penulis tidak dapat menyelesaikan sendiri tanpa bantuan dan bimbingan semua pihak, Penulis ingin memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada:

1. Bapak Dr. El Amry Bermawi, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional Jakarta.
2. Bapak Dr. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Nasional.
3. Ibu Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H. selaku selaku Pembimbing penulisan Tesis ini.
4. Bapak Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D selaku Penguji sidang tesis.
5. Kepada Seluruh Dosen Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Nasional yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Nasional.
6. Kepada Suami tercinta Tanwir SE dan teruntuk anak-anakku, Ananda Adam Sultansyah ST, Thoriq Syah Putra dan Moh. Rafi Albaihaqi yang sudah memberikan dukungan untuk selesainya studi magister ini.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan Rahmat dan karunia-Nya yang berlimpah kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan ini.

Jakarta, 24 Februari 2024
Penulis, Sriwati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN PENILAIAN TESIS ..	Error! Bookmark not defined.
TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN TESIS..	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	8
1. Kerangka Teori.....	8
2. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Sumber Data	13
2. Teknik Pengumpulan Data	14
3. Teknik Analisa Data.....	15
F. Ruang Lingkup Penelitian	16
G. Keaslian Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MINUMAN KERAS ARAK CIU	19
A. Tinjauan Umum Perdagangan Minuman Keras Beralkohol	19
1. Pengertian Minuman Keras Beralkohol Menurut Hukum Positif.....	19
2. Jenis dan Golongan Minuman Keras Beralkohol	21
3. Pembatasan atau Pengawasan Minuman Keras Beralkohol.....	24
4. Perdagangan Minuman Keras Beralkohol	25
B. Tinjauan Tentang Arak	29

1. Pengertian Arak.....	29
2. Klasifikasi Arak	30
3. Langkah Mencegah Bahaya Arak	30
4. Dampak Buruk dan Efek Samping Arak.....	31
5. Jenis Minuman Arak	31
C. Ketentuan Hukum Tentang Minuman Beralkohol	32
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA	
PERDAGANGAN MINUMAN KERAS ARAK CIU	36
A. Penegakan Hukum	36
1. Pengertian Penegakan Hukum	36
2. Fungsi Penegakan Hukum	39
3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	40
B. Analisis Kasus Putusan Pengadilan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bks.....	43
1. Posisi Kasus	43
2. Pasal Yang Didakwakan	45
3. Tuntutan	45
4. Pertimbangan Hakim.....	46
5. Amar Putusan	53
C. Analisis Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras Arak Ciu di Indonesia.....	54
BAB IV KENDALA DAN HARMONISASI PERATURAN DALAM	
MENGATASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MINUMAN	
KERAS JENIS ARAK CIU	68
A. Kendala Dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras Beralkohol Jenis Arak Ciu.....	68
1. Adanya Kebocoran Informasi Saat Melakukan Razia	68
2. Pemilik Usaha Yang Tidak Kooperatif	69
3. Pelaku Usaha Mengacuhkan Peraturan Daerah	71
4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menegakkan Peraturan Daerah.	71
B. Harmonisasi Keselarasan Peraturan Pemerintah Dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras Jenis Arak.....	73
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	